

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, 2014, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2012, *Beberapa Analisis Tentang Hukum Agraria III*, Penerbit Esa Studi Klub, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2015, *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya Cet 2*, Djambatan, Jakarta
- Mardalis, 2014, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet. 12*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nanang Martono, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- David Osborn dan Peter Plasterik, 2013, *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha Edisi Revisi*, terjemahan Abdul Rosyid dan Ramelan, PPM, Jakarta.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2016, *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ridwan, H. Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2014, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Sinambela, Lukman, 2014, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sinambela, Lijian Poltak, 2016, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2014, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI Press, Jakarta.
- Irawan Soerojo, 2015, *Kepastian Hukum hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya.

Supriadi, 2016, *Hukum Agraria Cet. 5*, Sinar Grafika, Jakarta.

Surjadi, 2016, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, PT RefikaAditama, Bandung.

Waskito, Hadi Arnowo, 2019, “*Menyelenggarakan Pendaftaran Tanah di Indonesia*”, Prenadamedia Group, Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2015, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2016, *Hukum, Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah*, Elsam & Huma, Jakarta.

Jurnal:

Kodar Udoyono, *E-Procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Untuk mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta*, Jurnal Studi Pemerintahan, Volume 3 Nomor 1 Februari 2012.

Rona Yunita Nugraheni, Budi Puspo Priyadi, Kismartini, *Inovasi Pelayanan Pertanahan Pengecekan Sertipikat Online*, Perspektif 31 Januari 2021.

Krisnawan Andiyanto, Dian Aries Mujiburrohan, Haryo Budhiawan, *Penerapan Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol.06 No. 1 April 2021.

I Wayan Jody Bagus Wiguna, *Tinjauan Yuridis terkait Pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol.05 No 1 April 2020.

Riswan Erfa, *Digitalisasi Administrasi Pertanahan untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy)*, Jurnal Pertanahan Vol 10 No. 1 Juli 2020.

Pius Tri Wahyudi, I Gusti Ayu KRH, *Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan*, Jurnal Repertorium Vol III No. 2 Juli-Desember 2016.

Nuriyanto, *Membangun Budaya hokum Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*, Integritas Volume 1 Nomor 1 November 2015.

Dyah Andriantini Sintha Dewi, *Analisis Yuridis Pelayanan Publik yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance dalam Konsep Welfare State*, Nagara Hukum Vol. 5 No. 2 November 2014.

Erick S Holle, *Pelayanan Publik melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi dalam Meningkatkan Public Service*, Jurnal Sasi Vol.17 No. 3 Juli-Setember 2011.

Anggita Doramia Lumbanraja, *Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi*, Administrative Law & Governance Journal Vol 3 Issue 2 June 2020.

Internet:

Profil BPN Kudus.

https://simpeg.atrbpn.go.id/simpeg_monev/profil/golongan/021216, di akses 7 Januari 2022.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas hak-hak Indonesia Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KEPMENDAGRI No.SK.26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Teknik Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standart Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik